

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENYEDIA JASA
PEMBAYARAN KREDIT**

(Studi di Locket Pembayaran Pandawa Sukarame, Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RIAN MANSUR INDRAWAN

NPM: 1521030263

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENYEDIA JASA
PEMBAYARAN KREDIT**

(Studi di Loker Pembayaran Pandawa Sukarame, Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RIAN MANSUR INDRAWAN

NPM: 1521030263

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M,Ag.
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan adanya kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hambanya untuk melakukan praktik muamalah seperti upah mengupah (*ujrah*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. *Ijarah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa yaitu upah. Dalam praktiknya yang terjadi di Loker Pembayaran Pandawa, Kec.Sukarame, Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa berupa pembayaran kredit kendaraan, pembayaran Listrik, pembayaran air PDAM, dan sebagainya. Tarif jasa yang diberikan yaitu sebesar 3% dari jumlah yang akan dibayarkan, akan tetapi penyedia jasa memberikan informasi tarif setelah transaksi dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah pada penyedia jasa pembayaran kredit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah pada penyedia jasa pembayaran kredit dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pada penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari penyedia jasa dan pengguna jasa dengan cara wawancara langsung kepada pemilik loker pembayaran pandawa dan pengguna jasa yang datang. Dari data yang telah terkumpul selanjutnya akan diteliti sesuai fakta yang terjadi dilapangan, sehingga mudah dipahami dengan menggunakan pendekatan normatif yang dilandasi pada tinjauan hukum Islam kemudian data dianalisis secara induktif. Praktik penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pandawa Sukarame, Bandar Lampung dilakukan dengan cara pengguna jasa datang langsung ke loker untuk melakukan pembayaran kredit dan menyerahkan bukti pembayaran terakhir, kemudian akan diproses oleh petugas loker. Setelah pihak penyedia jasa melakukan proses pembayaran kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Pengguna jasa akan mendapatkan bukti pembayaran dari petugas loker, dan diminta untuk membayar sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan ditambah dengan biaya pembayaran jasa sebesar 3% dari biaya angsuran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah pada penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ini tidak sah untuk dilakukan. Hal ini karena tidak terpenuhinya *shighah al-'aqd* yang terdapat dalam rukun *Ijarah*, yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Mansur Indrawan
Npm : 1521030263
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit (Studi di Locket Pembayara Pandawa Kecamatan Sukarama Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2020



Rian Mansur Indrawan

1521030263



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PENYEDIA JASA PEMBAYARAN KREDIT(Studi
Di Locket Pembayaran Pandawa Kec.Sukarame
Bandar Lampung)

Nama : Rian Mansur Indrawan

NPM : 1521030263

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
NIP. 195607271988031001

Juhratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENYEDIA
JASA PEMBAYARAN KREDIT** (Studi di Loker Pembayaran Pandawa
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)

disusun oleh : **Rian Mansur Indrawan**, NPM : **1521030263**, Jurusan :
Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada
hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : **Khoiruddin, M.S.I**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag**

Penguji I : **Drs.H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M.**

Penguji II : **Drs. H. Mundzir HZ, M, Ag.**

Penguji III : **Juhratul Khulwah, M.S.I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa [4] (29))



RIWAYAT HIDUP

Rian Mansur Indrawan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 November 1996, merupakan anak kedua dari pasangan bapak Satia Indra Putra dan ibu Nasiroh orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.

Pendidikan penulis dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Aji Daya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2002, berlanjut ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 29 Bandar Lampung selesai pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Satia Indra Putra yang selalu memberikan pengorbanan selama ini dan Ibu Nasiroh terimakasih atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kerja keras, serta nasihat dan doa yang tiada henti. Karya ini serta doa tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih bapak dan ibu tercinta.
2. Kepada abangku Ferdinal Kautsar, dan kedua adiku Aldi Setiawan, serta Neza Indira Nurmei Dinar terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan, dan selalu memberikan semangat serta memotivasi demi tercapainya cita-citaku, semoga kita semua bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit (Studi Di Locket Pembayaran Pandawa Kec.Sukarame Bandar Lampung)” dapat di selesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung;

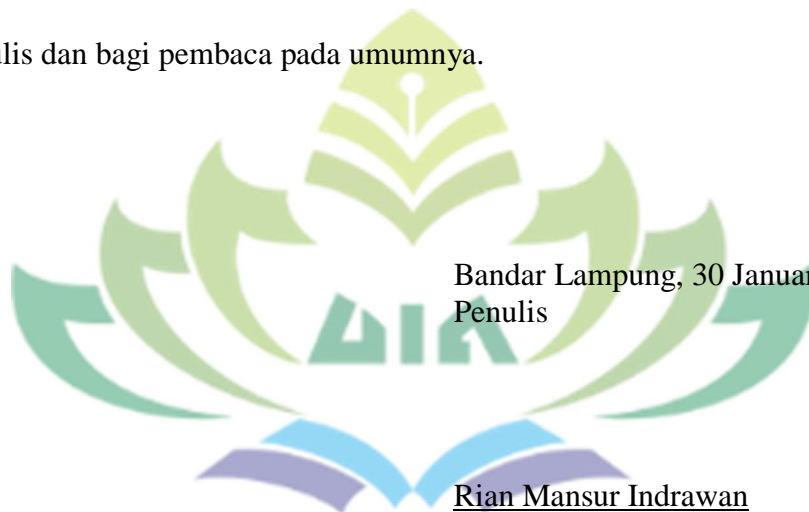
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak, Drs. H. Mundzir HZ, M,Ag. Selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I.selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan;
8. Sahabat-sahabat ku tersayang, Fadilah Tiwi Astuti S.H, Szasza Jalawida S.H ,Eka Wahyu Pradani S.H, Dico Rahmat Pratama S.H, Meri Andini S.H dan Andi Ade Anuar S.H, yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.;
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015 khususnya kelas E terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN RadenIntan Lampung;

10. Sahabat KKN kelompok 47 UIN RadenIntan Lampung, terimakasih atas dukungannya;

11. Almamater UIN RadenIntan Lampung.

Penulis menya dari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khusus nya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 30 Januari2020
Penulis

Rian Mansur Indrawan
1521030204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Penyedia Jasa	17
a. Pengetian Jasa	17
b. Karakteristik Jasa	20
c. Jenis-Jenis Jasa.....	21

2. Akad <i>Ijarah</i>	23
a. Pengertian Akad	23
b. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	27
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	31
d. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	38
e. Prinsip-Prinsip Akad <i>Ijarah</i>	41
f. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	44
g. <i>Ujrah</i> dalam Hukum Islam.....	46
h. Macam-Macam <i>Ujrah</i> (Upah).....	48
i. Hikmah <i>Ujrah</i> (Upah).....	51
B. Kajian Pustaka.....	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarame	55
2. Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Sukarame	57
3. Gambaran Wilayah Kelurahan Sukarame	59
4. Populasi Penduduk Wilayah Kelurahan Sukarame	61
5. Tingkat Pendidikan di Wilayah Kelurahan Sukarame	63
B. Gambaran Umum Loker Pembayaran Pandawa	64
1. Terbentuknya Loker Pembayaran Pandawa	64
2. Letak Geografis Loker Pembayaran Pandawa	64
3. Jenis Layanan Pembayaran	65
C. Praktik Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit di Loker Pembayaran Pandawa, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ...	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik <i>Upah</i> Penyedia Jasa Pembayaran Kredit di Loker Pandawa, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembayaran Kredit di Loker Pandawa, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di
Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung63
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kelurahan Sukarame
Kecamatan Kota Bandar Lampung64
3. Pengelola Loker Pembayaran Pandawa65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit (Studi Kasus di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca, uraiannya sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

sesuatu. Sedangkan mengupah adalah menyuruh orang bekerja dengan membayar upah.³

4. Jasa adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.⁴

5. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan pembayaran.⁵ Sedangkan kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, cara menjual barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur.⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai upah penyedia jasa pembayaran kredit di loket pembayaran Pandawa, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa telah terjadi suatu bentuk kegiatan terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit di Pandawa Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, yang belum diketahui bagaimana hukumnya menurut

³ Ibid., h. 868

⁴ Tjiptono, Fandy, *Service Management*; Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2008), h. 7.

⁵ Ibid., h. 152

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta:Asdi Mahasatya, 2007), h. 232

pandangan hukum Islam mengenai upah penyedia jasa pembayaran kredit.

- b. Bahwa pelaksanaan terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit ini telah terjadi di Pandawa Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung oleh karena itu perlu di teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini di angkat karena belum ada yang membahas pembahasan ini di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk di bahas dan di teliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (*al-Falah*).⁷ Islam memiliki aturan hukum yang dapat di jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunah. Islam memberikan petunjuk bagi

⁷Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3.

manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam sekitarnya.⁸

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan adanya kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hambanya untuk melakukan praktik muamalah seperti upah mengupah, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.⁹ Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-

⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

⁹Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang di kerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia memberikan upahnya.¹¹ Dalam setiap pekerjaan harus adanya kesepakatan dan keridhoan masing-masing pihak agar tidak terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman Q.S An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29).¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang mengerjakan sesuatu dengan benar dan tidak melanggar syariat-syariat Islam yang dibatasi tanpa mendzolimi antara satu dengan yang lainnya terhadap apa yang dikerjakan maka dalam setiap hasilnya tidak akan dirugikan. Namun dalam setiap pekerjaan wajib diberikan upah serta pembayaran upah yang di berikan harus di sesuaikan berdasarkan tenaga yang telah di keluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.¹³

Dahulu transaksi kredit hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, pengkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.

Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda. Pihak kedua adalah pemilik barang dan pihak ketiga adalah perusahaan pembiayaan atau pengkreditan atau perbankan. Pembayaran kredit merupakan suatu kewajiban bagi setiap pembeli yang menggunakan sistem kredit untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan, sehingga pembeli berkewajiban untuk membayarnya sampai waktu yang telah disepakati.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 122.

¹³ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 2000), h. 61.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁴ Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁵ *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *Ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.¹⁶

Ijarah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik sewa menyewa atau upah mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja,

¹⁴Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa: 2005), h. 377.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010), h. 114.

¹⁶Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), h.

besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan di antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal ini adanya praktik perikatan kerjasama diantara penyedia jasa pembayaran kredit yang terdapat pada loket pembayaran di Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan beberapa perusahaan yang terkait di dalamnya. Sebagai loket penyedia jasa pembayaran di Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung merupakan wakil beberapa perusahaan untuk menjadi perantara transaksi pembayaran dengan pihak ketiga yaitu konsumen. Fasilitas yang ditawarkan pada loket penyedia jasa ini adalah kemudahan transaksi, memangkas waktu antri dan lain sebagainya. Sistem transaksi yang digunakan pada loket penyedia jasa ini ialah secara *online* dengan mentransfer ke beberapa perusahaan yang terkait.

Namun permasalahan yang didapat pada penyedia jasa ini yaitu adanya upah pembayaran atas layanan jasa sebesar 3% dari nominal yang akan dibayarkan, akan tetapi pihak pengguna jasa tidak memberikan penjelasan mengenai upah yang akan dibebankan kepada pengguna jasa sebelum proses jasa pembayaran dilakukan. Sehingga pihak pengguna jasa tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan mengenai keinginannya untuk melanjutkan atau membatalkan proses jasa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji

permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit (Studi Kasus di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loker pembayaran Pandawa Sukarame Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di buat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada penyedia jasa pembayaran kredit di loket pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijarah* pada penyedia jasa pembayaran kredit di loket pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung..

G. Signifikansi penelitian

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah penyedia jasa khususnya upah penyedia jasa pembayaran kredit persfektif hukum Islam.

2. Signifikansi praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jasa yang lebih positif serta

diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan jasa pembayaran kredit

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Field Research yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara untuk mendapatkan informasi terhadap loket pembayaran di Pandawa Kecamatan Sukarama Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁸ Penelitian analisis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 3.

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁹ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang di miliki oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian di lakukan di Loker Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya didapat dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi

²⁰.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh

¹⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), h. 82.

²⁰ *Ibid*, h. 58.

salah dan dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dari pengumpulan data:²¹

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Locket Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarama Bandar Lampung.

b. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemilik Locket yang berjumlah 1 orang di Locket Pembayaran Pandawa di Sukarama, Kota Bandar Lampung, dan seluruh pengguna jasa yang berjumlah 107 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari pemilik Locket, pengelola, dan pengguna layanan jasa.

²¹Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan buku Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia yaitu kurang lebih 1 orang pemilik atau pengelola dan 10 orang pengguna jasa di Loker Pembayaran Pandawa Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan data tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²²

²²Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 115.

- b. *Koding*, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke kategori atau memberikan catatan atau urutan sumber masalah.²³
- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁴

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

²³*Ibid*, h. 115.

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 45.

kesimpulan umum.²⁵ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan secara fakta-fakta yang bersifat khusus.



²⁵Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), h. 112.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Penyedia Jasa

a. Pengertian Jasa

Tjiptono dalam bukunya yang berjudul *Service Management; Mewujudkan Layanan Prima* menjelaskan, jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.¹

Jasa sering dipandang sebagai fenomenal yang rumit, kata “jasa” (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai pada jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini banyak ahli pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Pengertian jasa menurut para ahli sebagai berikut:²

- 1) Kotler & Armstrong dalam mendefinikan “jasa yang merupakan suatu produk yang tidak berwujud. Membeli jasa sama dengan membeli sesuatu yang tidak berwujud. Bila melihat lebih jauh lagi antara produk (fisik) dan jasa sebenarnya keduanya memang sulit untuk dibedakan, karena biasanya pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas jasa.”
- 2) Adrian Payne, menyatakan bahwa “jasa ialah suatu kegiatan ekonomi yang memiliki sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangibel* yang berkaitan dengannya yang menghubungkan sejumlah interaksi dengan suatu pelanggan dan dengan barang-barang, tetapi tidak menghasilkan suatu transfer kepemilikan. Emitor perubahan kondisi dapat timbul dan

¹Tjiptono, Fandy, *Service Management; Mewujudkan Layanan Prima*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2008), h. 7.

² Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 347

suatu produksi layanan mungkin mempunyai atau mungkin tidak mempunyai hubungan dengan produk fisik.”

- 3) Cristian Gronross, menyatakan bahwa “jasa ialah suatu proses yang terdiri dari suatu serangkaian kegiatan yang berwujud dengan biasanya tetapi tidak selalu terjadi pada suatu interaksi antara suatu pelanggan dan layanan karyawan dan atau suatu sumber daya fisik atau barang atau penyedia sistem, yang disediakan sebagai solusi untuk permasalahan pelanggan. Suatu interaksi terhadap penyedia layanan dan pelanggan sering terjadi dalam pelayanan, bahkan jika suatu pihak yang terlibat mungkin tidak menyadari hal itu. Selain itu, dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan suatu perusahaan jasa.”
- 4) Zeithami dan Bitner, menyatakan bahwa “jasa ialah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan *output* tidak dalam bentuk suatu produk fisik atau bentuk yang biasanya yang dikonsumsi selama produksi dan memberikan suatu nilai tambah dalam bentuk seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan.”

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang (fisik). Griffin, menyebutkan tiga karakteristik yang membedakan produk jasa dengan produk barang, sebagai berikut:³

- a) *Intangibility* (tidak terwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai yang tak terwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
- b) *Unstorability* (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga *inseparability* (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.

³Ricky W. Griffin & Ronald J. Ebert, *Bisnis*, Alih Bahasa R. Soemarnagara, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 165.

c) *Customization* (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pengklarifikasian jasa didasarkan pada dua hal, pertama, didasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa dan kedua, yaitu jasa diklasifikasikan berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur.⁴

Berdasarkan tingkat kontak konsumen, jasa dapat dibedakan ke dalam kelompok sistem kontak tinggi (*high-contact system*) dan sistem kontak rendah (*low-contact system*). Pada kelompok sistem kontak tinggi konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh: jasa pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Sedangkan pada kelompok sistem kontak rendah, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh: jasa reparasi mobil dan jasa perbankan.

Berdasarkan kesamaannya dengan manufaktur, jasa dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu, jasa murni, jasa semi manufaktur dan jasa campuran. Jasa murni (*pure service*) merupakan jasa tergolong kontak tinggi, tanpa persediaan, misalnya ahli bedah yang memberikan ahli khusus (unik) dan memberikan jasanya pada saat konsumen berada ditempat. Sebaiknya, semi manufaktur (*quasi manufacturing service*) merupakan jasa yang tergolong kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa tersebut. Contoh: jasa pengantaran, perbankan, asuransi, dan kantor post. Sedangkan

⁴*Ibid*, h. 180.

jasa campuran (*mixed service*) merupakan kelompok jasa yang tergolong kontak menengah (*moderate-contact*) yaitu gabungan dari beberapa sifat jasa murni dan jasa semi manufaktur. Contoh: jasa ambulans, bengkel, *dry cleaning*, pemadam kebakaran dan lain lain.

Berdasarkan uraian tersebut, jasa ialah suatu pemberian kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain.

b. Karakteristik Jasa

Jasa memiliki empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi program pemasaran,⁵ yaitu:

- 1) Tidak berwujud (*intangibility*). Jasa tidak berwujud, tidak seperti produksi fisik, jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli, untuk memberi kepastian kepada para pembeli akan mencari tanda atau bukti mutu jasa. Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa, dan tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang mereka lihat.
- 2) Tidak terpisah (*inseparability*). Umumnya jasa dihasilkan secara bersamaan. Jasa tidak seperti barang fisik yang dapat diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan dalam melewati berbagai penjual dan kemudian baru dikonsumsi.
- 3) Bervariasi (*variability*). Jasa sangat bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu diberikan. Perusahaan dapat

⁵Tony Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*, (Jakarta: Indeks, 2011), h.16.

melakukan 3 langkah dalam rangka pengendalian mutu, pertama melakukan investasi untuk menciptakan prosedur, perekrutan dan pelatihan yang baik. Kedua, menstandarisasikan proses pelaksanaan jasa diseluruh organisasi. Ketiga, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran serta keluhan, survei pelanggan, serta melakukan belanja perbandingan.

- 4) Mudah lenyap (*perishability*). Jasa tidak dapat disimpan karena sifat jasa itu mudah lenyap. Tidak jadi masalah bila permintaan tetap. Namun, jika permintaan berfluktuasi maka perusahaan jasa menghadapi permasalahan yang rumit.⁶

Perusahaan jasa mempertunjukkan mutu jasa mereka melalui bukti fisik dan penyajian, akhirnya perusahaan jasa dapat memilih dari berbagai proses yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan.

c. Jenis-jenis Jasa

Jasa memiliki beberapa jenis yaitu :⁷

- 1) Jasa Usaha Rumah Tangga, jenis jasa ini mencakup banyak hal yang ada didalam. Contohnya: untuk merawat sebuah kebun, memperbaiki rumah, menjual air minum, kelengkapan alat-alat rumah tangga, sebagai pembersihan dan lain sebagainya.

⁶Rambat Lupioadi, A. Hamdan, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 84.

⁷Panji Tjiptono, *Pemasaran Jasa Prinsip, Penerapan, Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2014), h.89.

- 2) Jasa Perumahan, jenis jasa ini mencakup penyewaan sebuah kamar hotel (penginapan), kost-kostan, dan lain sebagainya.
- 3) Jasa Hiburan atau Rekreasi, jenis jasa ini meliputi penyewaan alat-alat yang berhubungan dengan suatu hiburan, atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan hiburan.
- 4) Jasa Perawatan Pribadi, jenis jasa ini adalah suatu perawatan kecantikan, pijit, salon dan lain sebagainya.
- 5) Jasa Kesehatan, jenis jasa yang satu ini termasuk jasa yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, contohnya ialah perawatan dirumah sakit, bidan, puskesmas dan lain sebagainya.
- 6) Jasa Bisnis, jasa ini meliputi jasa akuntan, jasa konsultan, jasa *marketing*, dan lain sebagainya.
- 7) Jasa Komunikasi, contoh jasa komunikasi yaitu warnet, wartel pengiriman fax, kantor pos dan lain sebagainya.
- 8) Jasa Transportasi, jenis jasa ini sering kita gunakan saat kita berpergian di suatu tempat, contohnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan lain sebagainya.
- 9) Jasa Keuangan, jenis jasa keuangan yang digunakan yaitu bank. Contohnya *leasing*, pajak, bank pinjaman dan lain sebagainya.
- 10) Jasa Pendidikan, jenis jasa ini sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara karena untuk mendidik anak-anak bangsa. Contoh jenis jasa

ini antara lain adalah guru privat, guru les, guru ngaji, guru sekolah dan lain sebagainya.

2. Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab *Ijarah* berasal dari kata: ⁸أَجَرَ yang sinonimnya:

- 1) ⁹أَجَرَ yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat : أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu)
- 2) ¹⁰أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya: ia memberinya upah, seperti kalimat كَذَّابًا أَجْرًا عَلَيَّ (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian)
- 3) ¹¹أَتَاهُ أَجْرًا yang artinya: memberinya pahala. seperti dalam kalimat: أَجَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya)¹²

Al-ijarah disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwadh* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajaran) dengan jalan penggantian. maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk

⁸ Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2005), h. 28.

⁹ Ali Mutahar, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), h. 129.

¹⁰ Atabaik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor..., h. 161.

¹¹ Ali Muatahar..., h. 14.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 315.

zatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan atau disewa, mobil disewa untuk perjalanan.¹³

Dalam syari'at Islam *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹⁴ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.¹⁵ Berdasarkan hal itu, menyewakan pohon agar dimanfaatkan buahnya hukumnya tidak sah karena pohon itu sendiri bukan keuntungan untuk manfaat. Demikian juga menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Alasannya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi bagian dari barang tersebut. Hukum sewa juga diberlakukan atas sapi, domba dan unta untuk diambil susunya. Akad sewa mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

a) Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

¹³ Herry, Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 200.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 203

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesino, 1994), h. 303.

الْإِجَارَةُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةَ بَعْضِ بِشْرُوطٍ تَأْتِي¹⁶

Artinya: “Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”

b) Sayyid Sabiq, dalam fiqhu-sunnah mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷

c) Menurut Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

d) Menurut Ulama Malikiyyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاثُفِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِدْمِي وَبَعْضِ الْمَنْفُولَانِ¹⁸

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

¹⁶ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II h. 246.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 258.

¹⁸ Abd.Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), h. 94-97.

e) Menurut Ulama Syafi'iyah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ¹⁹

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

f) Menurut Ulama Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Artinya: Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan sebagainya.²⁰

g) Menurut Idris Ahmad

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²¹

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

¹⁹ Muhammad Asy-Sarbini .*Mughni al-Muhtaj Juz III*, (Damsyik: al-Taufiq, 1996), h. 332.

²⁰ Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 323.

²¹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139.

Kalau diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:²²

- (a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul*
- (b) Adanya imbalan tertentu
- (c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

b. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan Jumhur Ulama memperbolehkan akad *ijarah* atas dasar sumber hukum, yaitu:

- 1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 210), h. 115.

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusunan itu kepada perempuan lain yang disukai ibu atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.²³

2) Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَتَمَرُوا بِبَنَاتِكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم
فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ۚ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq (65): 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orangtua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan itu.

²³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

3) Al-Qur'an surat Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْجَرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (QS. Al-Qashash (28): 26-27)

4) Dasar Hukum *Ijarah* dari hadis adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)

²⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), h.11.

5) *Ijma'*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum ketiga adalah *ijma'*.²⁵ Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁶ Kata *ijma'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, adalah “kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.”²⁷

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁸ Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya di pihak lain, ada yang mempunyai mobil dan

²⁵ Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, hal. 467. (On-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2369>. (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 20:50 WIB).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1990), h. 18.

²⁷ Satri Efendi, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2015), h. 125.

²⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.²⁹

c. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah*.

1) Rukun *Ijarah*

a) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

'Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajir*). *Mau'qud alaih* objek akad *ijarah* yakni manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.³⁰ Diisyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *thasaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Sighat ijarah yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara ke

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Cetakan ke II, (Jakarta: Kenacana, 2003), h. 217.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.101.

dua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.³¹ *Sighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab* dan untuk menerangkan persetujuannya.³²

c) *Ujrah* (Upah)

Ujrah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³³ Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d) Manfaat

Manfaat dari objek yang di Ijarkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi dan lain

³¹*Ibid*, h. 99.

³²Hasbi Ash-Shidiqqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.27.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.1250.

sebagainya yang mengarah pada perbuatan maksiat. Manfaat dari objek yang diijaraskan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat objek yang disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.³⁴

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijarah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijaraskan dan akad.³⁵ Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) *Shighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- (2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa pemberi jasa dan penyewa pengguna jasa.
- (3) Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

2) Syarat *Ijarah*

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bai'* yaitu:

a) Syarat dan terjadinya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat '*aqid*'. '*Aqid*' (orang yang berakad)

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 132.

³⁵ Fauzah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHMM, 2009), h.86.

disyaratkan berakal dan *mummayyiz*. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, 'Aqid itu disyaratkan *baligh* (dewasa). Oleh sebab itu apabila orang yang belum berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mummayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b) Syarat berlangsung akad (*syuruth an-nafadz*).

Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fuduli*.

Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang disewakan harus jelas

bahkan langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.³⁶

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah status *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁷ Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antara adanya wujud objek *ijarah*. Jika seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah itu dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarahnya* tidak sah sebagaimana kita ketahui dalam akad *ijarah*. Dengan

³⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 89.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.³⁸

c) Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, *maqud alaih*, *ujrah* dan *nafs al-'aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

(1) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4): 29)

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), h. 390.

(2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad *ijarah*)

Meski diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang nilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang pohon untuk diambil buahnya, domba untuk di perah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.³⁹

(3) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- (a) Objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatnya atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa dapat memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*.⁴⁰

³⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.22.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 315.

(b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaihi*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sekali.

d. Macam-Macam Akad *Ijarah*

Ijarah ada dua macam yaitu:

1) *Ijarah* atas Manfaat (sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

Cara menetapkan hukum akad *ijarah* yaitu: menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabillah ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah

olah seperti benda yang tampak. Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah dipihak lain.

2) *Ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan sebagainya. orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a) *Ajir* khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b) *Ajir mustarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.⁴¹

Selain itu dalam buku “perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya” yang ditulis oleh Sultan Remy Sjahdeini menyebutkan macam *ijarah*, diantaranya

“*ijarah wa iqtina* atau sering disebut juga dengan *ijarah muntahiyabittamlik* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir perjanjian di masa sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.327.

perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa apabila penyewa yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada ditangan penyewa.”⁴²

Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *ijarah muntahiya bittamlik* yang antara lain menyatakan:

- (1) Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditanda tangani.
- (2) Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- (3) *Ijarah Musyarakah Mutanaqisah* dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlakukan hanya untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank untuk menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian musyarakah dengan bank.⁴³
- (4) *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.⁴⁴

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Perada Media Group, 2014), h.272.

⁴³ *Ibid*, h.274.

⁴⁴ *Ibid*, h.275.

e. Prinsip-prinsip Akad *Ijarah*

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad *ijarah* yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).⁴⁵

Bermuamalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa prinsip-prinsip akad mu'amalah dalam Islam:

- a) Dalam bermuamalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari muamalah antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2013), h. 71.

mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermuamalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.⁴⁶

- b) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermuamalah. Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.⁴⁷ Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebatilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.
- c) Dalam bermu'amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁴⁸ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalanya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UII, 1990), h.10.

⁴⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat....*, h. 10.

dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermuamalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli *gharar*, akad-akad dimana terjadi menyembunyian cacat barang jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

- d) Prinsip semua akad dan muamalah tidak bisa sempurna kecuali dengan mengharapkan ukuran dan membataskan harga.⁴⁹ Semua muamalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyapun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkarannya sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.
- e) Prinsip dalam bermuamalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual-beli *gharar*, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.
- f) Prinsip muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup

⁴⁹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 196.

masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.⁵⁰

- g) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- h) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*..., h. 11.

sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah pada ahli waris. jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karna kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.⁵¹

- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada '*udzur*. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 652.

5) Pembatalan sepihak dari *'aqid* apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

g. Ujrah dalam Hukum Islam

1) Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁵²

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.121

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,⁵³ yaitu sebagai berikut:

a) Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ))⁵⁴

Artinya: Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Whb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “berikanlah kepada pekerja upahya sebelum kering keringatnya”⁵⁵

- b) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- c) Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

⁵³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Al-Qarni, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.806

⁵⁴ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h.20

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadist 8*, (Jakarta:Almahira, 2013), h.436

h. Macam-Macam (*Ujrah*) Upah

Pada pembahasan fiqih muamalah upah mengupah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Upah yang sepadan (*Ujrah al mitsli*)

Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

2) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al musammah*)

Upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu'jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*).

Pada era sekarang upah mengupah beragam jenisnya, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, seperti upah mengupah dalam pembayaran kredit.

3) Upah dalam Perbuatan Ibadah

Upah dalam proses pembayaran kredit dapat dikategorikan kedalam upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardu dan sebagainya haram hukumnya. *Ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewanya), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut. Upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw diantaranya :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ

وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ⁵⁶

Artinya: Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianta padanya,” (HR. Ahmad)

⁵⁶Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam bin Hanbal*, Cet ke. 1, (Muassatur Risalah, 2001), Jilid 3, h. 444.

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam ibadah, maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

4) Upah Sewa menyewa Tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam, maka harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanam tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.⁵⁷

5) Upah Pembekaman

Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat.⁵⁸ Usaha bekam tidak diharamkan, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu. Imam An-Nawawi berkata: Dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada *makarin el akhlaq* (sikap yang terpuji), dan keluruhan tindakan.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h. 30.

⁵⁸ Ibnu Ma'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 141.

6) Upah Perburuhan

Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada seseorang untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan tertentu.⁵⁹

h. Hikmah *Ujrah* (Upah)

Tujuan dibolehkannya *ujrah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Adapun hikmah diadakannya *ujrah* antara lain:⁶⁰

1) Membina Ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memeri jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt.

Transaksinya upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

⁵⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 325.

⁶⁰ [Htps://www.bacaanmadani.com](https://www.bacaanmadani.com) diakses pada 23 April 2019 Pukul 07.26.

2) Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

3) Memenuhi Hajar Hidup Masyarakat

Adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4) Menolak Kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

B. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

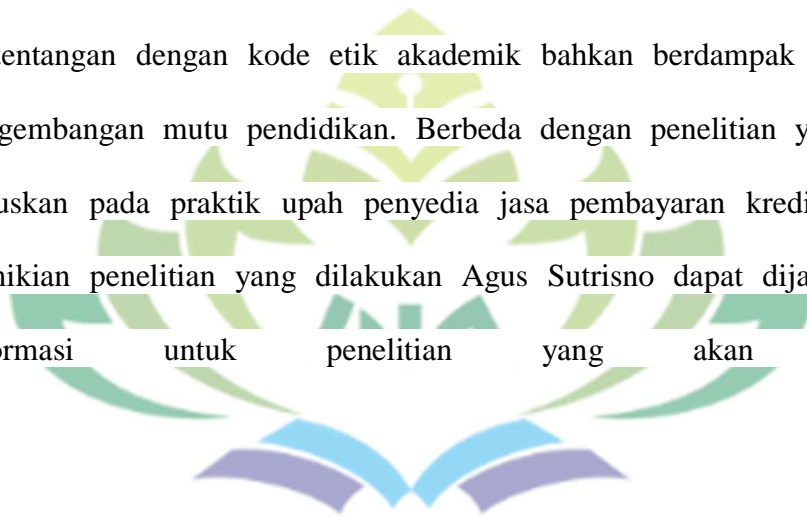
Pertama, Cecep Abdul Kadir Jaelani dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di BPRS PNM Binama Semarang (Studi Kasus Di PT. BPRS PNM Binama Semarang). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo, dilakukan dalam

rangka mengambil strata 1 program studi Muamalat, Fakultas Hukum dan Syariah Walisongo. Fokus penelitian yang dilakukan Cecep ialah tentang praktik penetapan upah yang dilakukan Multijasa menggunakan acuan prosentase, berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada upah penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Cecep Abdul Kadir Jaelani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kedua, Sherli Andini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada praktiknya, para pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik upah dalam penyedia jasa pembayaran

kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan sherli dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, Agus Sutrisno dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah. (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari) penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Kendari, dilakukan dalam rangkamengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Hukum dan syariah IAIN Kendari. Fokus penelitian yang dilakukan Agus ialah tentang praktik jasa yang diberikan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada praktik upah penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Agus Sutrisno dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān al-Karīm

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro. Cet. 5.

B. Hadist

H.R. Imam Muslim, dalam Shahih Muslim, Kitab Minuman, No (5337), Bab Setiap yang Memabukkan Adalah Arak, dan Setiap yang Memabukkan Adalah Haram. Juz 6, h. 100.

H.R. Imam Ibnu Majjah, dalam Sunnan Ibnu Majjah, kitab Minuman, No (3515), Bab Setiap Hal yang Memabukkan itu *Khamr*, Juz 10, h. 306.

C. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004, Cet.I.

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978.

Abu Bakr Al-jazairi, *Ensiklopi Muslim*, Bekasi: Darul Fikr, 2017.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta)

Agus Ruswandi, *Al-Islami III*, Uninus Bandung, 2015.

Ahsin w. Alhafis, *fiqh Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aminuddin, *Bahaya Minuman Beralkohol*, Jakarta: Quarda, 2010.

Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta: Quarda, 2010.

Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII Yogyakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dr. Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, Yogyakarta: PT Leukia Nouvalitera, 2019.
- Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT Grafindo Parsada.
- Lexy, John, Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosda, 2001.
- M. Hukmat, *Awas Dampak Narkoba Bagi Remaja, Waspadalah* Bandung: Gafitri, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet. 4.
- Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang CV. Toha Putra, 1992.
- Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Randi Muchariman, Helmi Al Djufri, *Siyasah Kebangsaan*, Purwokerto Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016.
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma'rif 1997.

Sayuti pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Tan Hoan Tjay, *Obat-Obatan Pernting Edisi Ketujuh*, Jakarta : Gramedia.
Wahyudin Achmad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyat da’wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) ,hlm. 89

D. Media Online

Akibat Pengaruh Minuman Keras Seorang Pemuda di Lampung Tengah mau Perkosa Nenek-nenek (tersedia di <https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/08/14/> , diakses pada 18 Januari 2020 pukul 13.06 WIB).

Mabuk Minuman Keras Seorang Anak di Lampung Tengah Tega Aniaya Ibu Kandung Hingga Dirawat di Rumah Sakit (tersedia di <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/13/> 18 Januari 2020 pukul 13.45 WIB).

E. Sumber dari Jurnal dan Skripsi

Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 47-63.

Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2)

Mutasir, M. (2020). NON MUSLIM SEBAGAI MENTERI TANFIDZI PERSFEKTIF PEMIKIRAN AL-MAWARDI. *An-Nida'*, 42(2), 1-20.

Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qurâ€™™ an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.

Ilham Dwi Maryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Study Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan , Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)” (*Skripsi* Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Muh. Wildan Fakhturi, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” (*Skripsi* Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

F. Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

